

**PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI ADAL DI PENGADILAN AGAMA
LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR
(PUTUSAN HAKIM TAHUN 2008)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

FAUZAN ISMAIL RATULOLY

NIM. 10100113011

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAUZAN ISMAIL RATULOLY
Nim : 10100113011
Tempat /Tgl. Lahir : Waiwerang, 01 Juli 1994
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal di Pengadilan Agama
Larantuka Kabupaten Flores Timur (Putusan Hakim Tahun 2008)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur (Putusan Hakim Tahun 2008)” adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 29 Juni 2017

Penyusun



FAUZAN ISMAIL RATULOLY

Nim: 10100113011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI ADAL DI PENGADILAN AGAMA LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR (PUTUSAN HAKIM TAHUN 2008)” yang disusun oleh Fauzan Ismail Ratuloly, NIM: 10100113011, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 15 Agustus 2017 M
22 Zulkaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI	(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya. Tak lupa pula penulis ucapkan salam dan shalawat kepada Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan (jahiliyah) ke jalan yang terang benderang seperti sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Drs. Moh. Arsyad Ratuloly dan Ibunda tercinta Marwiah, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku yang tercinta beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang

tak terhitung kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalem dan tak terhitung terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. H. Supardin M.H.I.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak **Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis dalam hal ini yakni dari pihak Pengadilan Agama Larantuka yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Sahabat-Sahabati di UIN Alauddin Makassar terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini, khususnya Muh. Syahrul, Ahmad Noor, M. Ikho Hasmunir, M. Ardiansyah, M. Idham, Maulana Amin Tahir, Siti Wulandari, Uswatun Hasanah.

8. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2013 Khususnya M. Awwaluddin Ar-Rasyid, Amri, Muh. Faqih, Mahfudz Kamil, Jumardin S.H, Jumardi S.H, Wahyudi Sahri, Muh. Anhar, Nurhadi, Riswan Setiawan, Sahrul, Ardianyah Basir, M. Mahdi, Mifta, Firman, Rijal, Chaeril Anwar, Hardiansyah Dewa terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
9. Ukthi-ukthi khususnya Peradilan Agama A, Nurul Inayah Hasyim, Suryana, Siti Nurjannah, Dwiyanti, Irmayanti, Niryad Muqisthi, Hasmaniar Hasyim, Megawati, Nurul Mu'minati Idris, Suarni Yasir, Mufliha Burhanuddin, Nurhaini, Khaerunnisa Syam, Hasnaeba, Mutmainnah Akis, Laila Humaidah, Andi Srismiati, Nurul Atira, Rezki Amelia, Fitri Uthami Syahriani, Almi Ahmad. Terimakasih karena tak bosan-bosannya menyemangati penulis ketika dalam keadaan terpuruk.
10. Seluruh teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 53 khususnya posko Kelurahan Romang Lompoa M. Faris Hidayat, Fadil Hasbi, Risnawati, Andi Zhulfiati, Sumarni Rauf, Nasrida Umar, Kiki Rezky. Terima Kasih atas doa, dukungan dan motivasinya selama ini.
11. Kepada Teman-Teman Seperjuangan SMA Negeri 1 Larantuka Angkatan 2013 yang selalu memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa

dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.



Makassar, 29 Juni 2017

Penulis

FAUZAN ISMAIL RATULOLY

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Hukum Perkawinan	11
3. Tujuan, Fungsi dan Asas-asas Perkawinan	14
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Wali.....	23
1. Pengertian Wali Nikah	23
2. Dasar Hukum Wali Nikah	25
3. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	26
4. Macam-Macam Wali Nikah	27
C. Tinjauan Tentang Wali Aḍal	29
1. Pengertian Wali Aḍal	29

2. Penyelesaian Wali Adal Menurut Hukum Islam.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Pengumpulan Data	39
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Alasan Pengajuan Permohonan Wali Adal di Pengadilan Agama Larantuka	54
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Larantuka Dalam Penetapan Wali Adal	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
	<i>Kasrah</i>	i	i
	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *husus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

NAMA : FAUZAN ISMAIL RATULOLY

NIM : 10100113011

JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI
ADAL DI PENGADILAN AGAMA LARANTUKA
KABUPATEN FLORES TIMUR (PUTUSAN HAKIM
TAHUN 2008)

Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali *Adal* di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan putusan hakim tahun 2008, dengan pernikahan manusia akan berkembang biak sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Sebaliknya tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus dan duniapun akan sepi dan tidak berarti. Namun dalam pelaksanaannya perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksetujuan dari pihak perempuan. Dalam hal ini ayah kandung dari wanita tersebut untuk menjadi wali nikah dengan berbagai alasan padahal pihak laki-laki telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk menikah, terlebih antara mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Hal ini murni dari keinginan mereka berdua karena adanya rasa cinta dan kasih sayang dari keduanya. Berlatar belakang dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejauh manakah alasan pengajuan permohonan wali *adal* dan bagaimana pertimbangan hakim. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur, sedangkan respondennya adalah Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Larantuka. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya perkawinan melalui wali *adal* di Pengadilan Agama Kabupaten Flores Timur dikarenakan wali nasab enggan untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di bumi adalah terdiri dari dua jenis laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup itu baik segifisik maupun dari segi psikis mempunyai sifat-sifat berbeda. Namun secara biologis kedua jenis makhluk tersebut saling membutuhkan, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodohan, yang secara harfiah disebut perkawinan: “Perkawinan merupakan salah satu sunnah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.”¹

Allah swt tidak mau manusia seperti makhluk lain yang hidupnya mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Tetapi demi menjaga martabat dan kehormatannya, Allah swt adakan prinsip-prinsip dan hukum yang sesuai martabatnya sehingga hubungan pria dan wanita diatur secara terhormat didasarkan saling ridho-meridhoi dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa sepasang pria dan wanita itu saling terikat.

Dengan pernikahan manusia akan berkembang biak sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Sebaliknya tanpa pernikahan regenerasi akan

¹M. Tholib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung : Irsyad Baitu Salam, 1995) h. 21.

terhenti, kehidupan manusia akan terputus dan duniapun akan sepi dan tidak berarti.

Dapat diketahui bahwa kedua belah pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus ada persetujuan yang bebas dari kedua orangtua ataupun kedua belah pihak yang akan mengadakan perkawinan yang telah disepakati karena menurut syari'at Islam perkawinan merupakan ikatan persetujuan atas dasar keridhoan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak wali perempuan maupun wakilnya.

Dalam pelaksanaannya perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksetujuan dari pihak perempuan. Dalam hal ini ayah kandung dari wanita tersebut untuk menjadi wali nikah dengan berbagai alasan padahal pihak laki-laki telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk menikah terlebih antara mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Hal ini murni dari keinginan mereka berdua karena adanya rasa cinta dan kasih sayang dari keduanya.

Hadirnya wali dalam sebuah pernikahan merupakan suatu rukun dalam sebuah pernikahan sehingga apabila tidak ada wali maka pernikahan itu dapat dianggap tidak sah.

Seperti diketahui bahwa secara hukum fiqih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan secara jelas ada kemungkinan seorang perempuan untuk memilih dengan berwali hakim. Namun apakah pemilihan wali hakim menjadi wali nikah dapat dilaksanakan oleh calon mempelai wanita dengan serta merta tanpa ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Dengan kata lain, apabila seorang wali nasab yang enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut, disebabkan oleh ketidaksukaan wali kepada calon mempelai laki-laki misalnya, apakah calon mempelai wanita langsung dapat meminta seorang petugas resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi wali nikahnya.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI ADAL DI PENGADILAN AGAMA LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR (PUTUSAN HAKIM TAHUN 2008)”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:

“Pelaksanaan perkawinan melalui wali adal di Pengadilan Agama Larantuka”

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan artinya suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.²

2. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

²KBBI offline. Versi 1.2. Ehta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III. 2010.

suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

3. Wali *adal*

Wali *adal* adalah seorang wali nasab yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur dan berdasarkan depskripsi fokus penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perkawinan melalui wali *adal* karena enggannya wali nasab dari calon mempelai wanita.

C. Rumusan masalah

Ketentuan wali dalam pelaksanaan suatu pernikahan adalah merupakan salah satu rukun pernikahan. Kenyatannya kadang terjadi pernikahan tanpa persetujuan wali dimana akhirnya pihak-pihak yang ingin menikah terpaksa mencari wali dalam koridor yang dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu penulis terfokus untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan melalui wali *adal*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana alasan pengajuan permohonan wali *adal* di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur.

³Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 2.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur dalam penetapan wali *adhal*.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan wali *adhal* diantaranya:

Pertama, Lukmanul Hakim. *Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Dilahirkan Diluar Nikah*, tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang pengangkatan wali hakim karena alasan bahwa pihak wanita tidak mempunyai wali karena merupakan anak luar nikah yang mengakibatkan terputusnya hubungan nasab antara wali (ayahnya). Sehingga wali hakimlah yang menikahkan bagi anak perempuan yang dilahirkan di luar nikah.

Kedua, Mutiara Mei Ayuningtyas, *Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan*, tahun 2008. Skripsi membahas tentang kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara permohonan dan penetapan wali *adhal* dengan asas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan.

Ketiga, Ade Puspita Sari, *Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Cibinong*, tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang cara penyelesaian apabila terjadi wali yang menolak menikahkan (*adhal*).

Keempat, Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal*, tahun 2014.

Skripsi ini membahas tentang dasar proses awal masuknya perkara sampai dengan penyelesaian perkara.

Kelima, Zumma Nadia Ar-Rifqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adal*, tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim dalam menyelesaikan perkara wali adal.

Disamping karya-karya yang disebutkan, yang membahas tentang wali, menurut pengamatan penulis bahwa belum dijumpai karya ilmiah yang membahas secara langsung tentang wali *adal* secara detail. Skripsi ini akan memperdalam permasalahan wali *adal* menyangkut pelaksanaan perkawinan melalui wali *adal* dan pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adal*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui status alasan pengajuan permohonan wali *adal* di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali *adal* di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur.

2. Manfaat penelitian

- a. Kegunaan akademik untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Islam.
- b. Pengembangan dan pengaktualitasian dalam konteks Hukum Islam (Syariah) umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

- c. Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang wali *aḍal*.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Menurut bahasa nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau berhubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Al-fara’ mengatakan ; ” An-Nukh” adalah sebutan untuk kelamin. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan; akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula bahwa, berpasangan itu juga merupakan salah satu makna nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara itu, Al-Farisi mengatakan; jika mereka mengatakan si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah hubungan badan.¹

¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 7-8.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.²

Pengertian perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridaan Allah swt. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu yang dipilih Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

²Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet.III; Jakarta:PT. Bumi Aksara,2000), h.1.

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan kepada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut hukum Islam. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain nikah juga diartikan sebagai bersetubuh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2: perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan

³Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Qur'an, 2012), h. 77.

⁴Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: , 2003), h. 2.

melestarikan hidupnya selama setelah masing-masing melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rida-meridai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁵

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang biasa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

2. Hukum Perkawinan

Para fukaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada kondisi pribadi seseorang. Adapun uraiannya sebagai berikut:⁶

⁵Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), h. 9-10.

⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), h. 7-10.

a. Wajib

Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah baik dari segi fisik, mental dan materi dan dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina bila tidak menikah. Dengan asumsi bahwa menjauhkan diri dari yang haram adalah hukumnya wajib. Menurut Imam Al-Qurtubi, mengatakan bahwa “seorang bujangan yang mampu menikah dan takut akan diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan menyelamatkan diri kecuali menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah bagi dirinya. Allah berfirman dalam Q.S An-Nur/24 : 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا
فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصَنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ
وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.⁷

b. Sunnah

Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari segi fisik, mental, dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat zina.

c. Mubah

Mubah sebagai asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah.

d. Makruh

Makruh hukumnya menikah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir (Sandang, pangan dan papan) maupun nafkah batin (hubungan seksual), meskipun hal tersebut tidak merugikan istri karena ia kaya raya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Haram

Haram menikah apabila seseorang meyakini dirinya tidak mampu memenuhi nafkah (lahir dan batin) kepada istrinya, sementara nafsunya tidak terlalu mendesak, sehingga hanya menyakiti istrinya baik dari segi fisik maupun psikis.

⁷Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Qur'an, 2012), h. 354.

3. Tujuan, Fungsi dan Asas -Asas Perkawinan.

a. Tujuan Perkawinan

Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya dalam versi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka memandang perkawinan tersebut.⁸

Menurut Abdul Muhamin As'ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta di antara suami istri tersebut.⁹

Soemijati, S.H memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹⁰

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tertera pada pasal (1) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal

⁸Sabri Samin, *Fikih II* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 27.

⁹Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah* (Surabaya: Bintang Terong, 1993), h.7.

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 27.

(3) disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena masalah perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal, ini berarti bahwa perkawinan berlaku untuk seumur hidup atau untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali karena disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Pemutusan ikatan perkawinan dengan jalan perceraian merupakan jalan terakhir atau solusi alternatif yang ditempuh setelah usaha-usaha lain termasuk penasehatan dan mediasi kepada kedua belah pihak (suami-istri) benar-benar tidak dapat memberikan pemecahan atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.

Secara fisiologis tujuan perkawinan yaitu sebuah keluarga harus dapat menjadi :

1. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
2. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan-minum pakaian yang memadai.

3. Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :

1. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
2. Unit sosial terkecil yang menjembatangi interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

b. Fungsi Perkawinan

Adapun fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang halal.
- 2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah.
- 3) Sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketenteraman jiwa.

c. Asas - Asas Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, dengan demikian perlu ada asas atau prinsip dalam perkawinan; dalam hal ini Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tharigan, mengemukakan bahwa apabila disederhanakan Asas-asas perkawinan itu ada enam, yaitu:

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas monogami.

- 4) Calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri seimbang.¹¹

Secara garis besar dalam perundang-undangan, asas-asas dalam perkawinan antara lain:

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- 3) Asas monogami terbuka.
- 4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
- 7) Asas pencatatan perkawinan.¹²

Sedangkan menurut penulis, setelah memahami konteks Peraturan perundang-undangan perkawinan dan beberapa ayat yang berkaitan dengan perkawinan, penulis berasumsi bahwa pada dasarnya asas-asas perkawinan ada lima yaitu:

- 1) Asas legalitas pada hakekatnya setiap perkawinan harus mendapatkan legitimasi atau legalitas hukum baik yang berkenaan dengan hukum

¹¹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 54.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.7.

Agama (syariat Islam) maupun yang berkenaan dengan hukum Negara (Peraturan Perundang-undangan), hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sebagai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi suami istri dan hak-hak dan kewajiban anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah. Selanjutnya perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama/kepercayaan dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Asas sukarela pada prinsipnya perkawinan itu harus ada persetujuan secara sukarela bagi pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan termasuk calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan walinya sehingga tidak boleh salah satu pihak dipaksa atau merasa terpaksa untuk melakukan perkawinan. Untuk menghindari terjadinya kawin paksa maka dalam Undang-Undang perkawinan pasal 6 ayat (1) mengisyaratkan adanya persetujuan calon mempelai, yang dibuktikan dengan surat persetujuan mempelai (model N3). Oleh karena itu, itu calon mempelai berhak untuk tidak menandatangani surat persetujuan mempelai (model N3) apabila tidak menyetujui perkawinan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan itu tidak mengenal adanya istilah wali mujbir atau wali nikah yang mempunyai hak paksa untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang pria dalam batas-batas yang wajar.

- 3) Asas kematangan dalam perkawinan tidak semua yang dilalui adalah sesuatu yang indah atau sesuatu yang membahagiakan, namun terkadang diperhadapkan pada berbagai macam problema atau persoalan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan rumah tangga, maka dengan demikian kematangan calon mempelai sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan bahwa calon suami istri harus matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mencapai tujuan dari sebuah perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas minimal usia untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan menikah pada usia 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita.
- 4) Asas kesetaraan antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak boleh satu pihak merasa menguasai sehingga pihak lain merasa tertekan atau merasa diperlakukan secara tidak baik.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah:

- a. Calon mempelai pria dan wanita.

- b. Wali dari calon mempelai wanita.
- c. Dua orang saksi (pria).
- d. Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya.
- e. Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya.¹³

2. Syarat Perkawinan

Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan hukum, adapun syarat perkawinan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu;

- a. Syarat menurut syariah
 - 1) Syarat calon pengantin pria adalah: Beragama Islam, pria, tidak dipaksa, tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 2) Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak dipaksa, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 3) Syarat wali yaitu: Beragama Islam, pria, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi I (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 45.

- 4) Syarat saksi yaitu : beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud ijab-qabul, tidak merangkap jadi wali.
- 5) Syarat ijab-qabul yaitu: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah.

Selain itu, Mahar juga termasuk dalam syarat sah perkawinan dan merupakan suatu kewajiban, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan. Maksudnya adalah bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami.¹⁴

b. Syarat menurut perundang-undangan

Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

¹⁴Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 66.

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.¹⁵

Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal ini Undang-Undang RI No.1.tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 58.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).¹⁶

Dalam KUHPdata pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan wanita belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan untuk kawin.

Walaupun terjadi perbedaan umur perkawinan, namun untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak agar kedua pihak yang akan menjadi suami istri benar-benar harus telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga tidak mempermudah terjadinya perceraian.

B. Tinjauan Umum tentang Wali

1. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam bahasa Arab disebut *wilayah*. Kata *wilayah* berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarak untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri.¹⁷

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 4.

¹⁷Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 83.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.¹⁸

Kalangan Hanafiah membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-walayah 'alan-nafs), perwalian terhadap harta (al-walayah 'alal-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta (al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma-an), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktifitas anak yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.¹⁹

Secara umum wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.²⁰

Penjelasan “wali” diatas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud “wali” dalam pembahasan ini adalah “wali nikah”.

Sedangkan secara terminologi wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa izin dan dilibatkannya walinya maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.²¹

¹⁸Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:Raja Grafindo, 2005), h. 134.

¹⁹*Perbedaan Madzhab Tentang Wali Nikah*, <http://omarlovenadhifah.blogspot.co.id/2012/05/perbedaan-madzhah-tentang-wali-nikah.html>=1, Diakses 04 Juli 2017

²⁰Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011), h. 69.

²¹Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 89.

Mengenai perwalian Kompilasi Hukum Islam merinci sebagai berikut dalam pasal 107 :

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.²²

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali dalam pernikahan adalah sebagaimana firman

Allah dalam al-Qur'an Q.S An-nur/24:32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

²²Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 33

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 19 :

“Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.²⁴

Keberadaan wali sebagai rukun nikah seperti terdapat dalam pemikiran Malikiyyah, Syafi’iyyah maupun Hanabilah. Oleh karena itu, dalam prosesi akad nikah diwajibkan adanya seorang wali karena merupakan rukun yang harus dipenuhi. Sudah selayaknya wali ada dalam perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena akan menginjak dunia baru untuk membentuk keluarga sehingga diperlukan partisipasi dari pihak keluarga untuk merestui perkawinan tersebut. Oleh orang yang masih berada dibawah usia 21 tahun (pria atau wanita) maka diperlukan izin dari orang tua.²⁵

3. Syarat-Syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Untuk menjadi wali, seseorang harus memenuhi beberapa syarat :

- a. Islam
- b. Baligh

²³Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Qur'an, 2012), h. 354.

²⁴Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 6.

²⁵Arso Sosroatmojo dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 25.

- c. Merdeka
- d. Laki-laki
- e. Berakal sehat
- f. Adil, tidak fasik.²⁶

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan pada pasal 20 ayat 1, yang berbunyi

“ Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh. ”

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. bagaimana mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.²⁷

4. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam Al-quran maupun hadis telah diterangkan secara jelas bahwa pernikahan tanpa seorang wali itu hukumnya batal dan tidak sah. Maka dari itu siapa saja orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan akan dibahas satu persatu.

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara rinci mengenai urutan wali dalam pernikahan. Yang dijelaskan pada pasal 21 yang berbunyi :²⁸

²⁶Sulaiman Rasjid, *fiqh islam* (Bandung, Sinar Baru Alegenindo, 2014), h. 374.

²⁷Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 7.

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Diantaranya : Pertama, kelompok kerabat laki-laki lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

b. Wali hakim

Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qodi. Wali yang jauh bisa menjadi wali nikah apabila wali yang dekat berhalangan untuk menjadi wali.

²⁸Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 7-8.

Wali hakim yang dimaksudkan dalam perkawinan bukanlah wali yang menjadi hakim di Pengadilan Agama, melainkan wali yang ditunjuk melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

c. Wali muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.²⁹

C. Tinjauan tentang Wali Aḍal

1. Pengertian Wali Aḍal

Kata '*aḍal*' menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضل – يعضل عضلا*. Sedangkan menurut istilah wali *aḍal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.³⁰

²⁹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.25.

³⁰Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal* (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 28.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah member nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orangtuanya/walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju mengizinkannya atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan.

Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan *adalnya* wali. jika ada wali *adil*, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adalnya* wali.³¹

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adil* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

³¹Abdul Rahman I. Doi, Ph.D, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 26.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain.

Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.³²

2. Penyelesaian Wali Adal Menurut Hukum Islam

1. Pendapat Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, ada kecendrungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adal* ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan “Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai

³²Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),h. 12.

sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.”³³

Dengan dapat diperoleh kesimpulan umum, bahwa dalam Mazhab Maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali *adhal* tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *adhalnya*.

2. Pendapat Mazhab Hanbali

Di dalam Mazhab Hanbali diceritakan tentang Ahmad bin Hanbal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *adhal*. Di satu riwayat, bahwa wali yang *adhal* terutama yang *adhal* itu adalah wali aqrab, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali ab'ad, sedang di sisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.

Upaya penyelesaian wali *adhal* telah ditanggapi oleh kalangan mazhab Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Walau demikian Syeh Abdurrahman Al Jaziri sebagaimana dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat Hanabilah mengenai wali *adhal* ini, pendapat beliau: “Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai,

³³Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Cirebon: Skripsi IAIN Syech Nurjati, 2013), h. 64.

dan dengan memberi mahar dan dia telah mencapai umur sembilan belas tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadannya wali terhadap maulanya dan bila wali itu *adhal* maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir.”³⁴

Demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali *adhal* berikut upaya penyelesaiannya. Kiranya dari keterangan tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Hanbali dalam hal ini ulamanya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali *adhal* dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetapi dalam keadaluannya. Namun demikian ada di antara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali *adhal* dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.

3. Pendapat Mazhab Hanafi

Di dalam mazhab Hanafiah juga telah di dapati keterangan mengenai wali *adhal* tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut. Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya bahwa menurut ulama madzhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin

³⁴ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Cirebon: Skripsi IAIN Syech Nurjati, 2013), h. 66-67.

dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.³⁵

4. Pendapat Mazhab Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali adal berikut penyelesaiannya di dalam mazhab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *adal* tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali *adal* tersebut sebagai pihak yang diperlukan tidak adil atau rugikan.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali *adal* tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi'i yakni Imam Jalaluddin al Mahalli yang antara lain menerangkan “ Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu *adal* adalah di muka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk

³⁵ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Cirebon: Skripsi IAIN Syech Nurjati, 2013), h. 68-69.

memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali *adhal* akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali *adhal*.”

Dari ulasan tersebut semakin terang, bahwa langkah awal yang di sajikan ulama fiqih dalam menghadapi wali *adhal* tersebut, yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan menarik kembali taubat dari *adhal-nya*, bagaimanapun langkah awal tersebut dapat di pahami sebagai wujud dari analogi terhadap sejarah masa lalunya, yaitu sejarah wali *adhal* yang terjadi pada masa Rasulullah saw, dan pelakunya adalah Ma'qil Ibnu Yasar.

Demikian bila terjadi pembangkangan dari wali *adhal* ini, artinya cara awal yang ditempuh hakim belum dapat diantisipasi sikap ke *adhalan-nya* wali tersebut. Menurut Madzhab ini, maka hakim yang telah mengawinkan atas diri maula dari wali *adhal* tersebut atau mewakilkan kepada orang lain untuk mengawinkan.

Dalam keterangan yang lain Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali pergantian wali atas diri wali *adhal* kepada hakim. Ini terjadi manakala yang *adhal* itu dari wali dekat aqrab. Sedang wali yang lain yaitu wali yang ab'ad tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan “Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang

berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim. Diantaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali yang *adhal* tersebut, kalau saja ghaib maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya dan telah membenarkan laporan tersebut maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat wali aqrab dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan kalau pun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.”

Demikianlah penjelasan dari mazhab Syafi'i berikut para ulama' pengikutnya mengenai problema wali *adhal* berikut upaya penyelesaiannya, dan dari penjelasan tadi atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Syafi'i wali *adhal* akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menangannya mengenai ke *adhal*-nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut ke *adhal*-nya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan kalau saja

dia masih mencegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.³⁶



³⁶Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Cirebon: Skripsi IAIN Syech Nurjati, 2013), h. 70-72.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten Flores Timur dengan objek penelitian Pengadilan Agama Larantuka , untuk memperoleh informasi dan data mengenai proses pelaksanaan, alasan pengajuan wali *adal* dan pertimbangan hakim mengenai wali *adal* dan yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau data yang akurat mengenai pelaksanaan perkawinan melalui wali *adal* di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang pelaksanaan perkawinan melalui wali *adal* di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur . Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, suatu organisasi atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti. Dengan demikian

Penelitian studi kasus, lebih mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data ini berkenaan dengan nilai kualitas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata.
- b) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

- b. Data lapangan melalui Field research, yaitu bahan atau data yang diperoleh dari lapangan selain buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri pelaksanaan perkawinan di Pengadilan Agama Larantuka tanpa mengikuti rangkaian persidangannya.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal

yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*Open ended*” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan melalui wali *adal*.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan melalui wali *adal* di Pengadilan Agama Larantuka. Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan

¹Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I;Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data/informasi tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Pengadilan Agama Larantuka, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Larantuka.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data dengan jalan persentase melalui analisis statistik deskriptif.

BAB IV

PENGAJUAN PERMOHONAN WALI ADAL DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADAL

A. Gambaran Umum Kantor Pengadilan Agama Larantuka

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Larantuka

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama Larantuka adalah :

- 1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- 5) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Pembentukan 4 Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang.
- 6) Staatblaad Nomor 227 Tahun 1927 Tentang Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Nomor 28 Perwakafan Tanah Milik.

- 9) Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilingkungan PU, PTUN dan PA ke Mahkamah Agung.
- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama.
- 11) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- 12) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 13) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 14) Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 15) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama.
- 16) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹

¹Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Larantuka

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Larantuka

Sesuai penetapan Menteri Agama RI No. 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, maka dibentuklah Pengadilan Ende yang mewilayahi Pulau Flores. Dalam perkembangan selanjutnya, terbitlah keputusan menteri agama RI No. 95 tahun 1982 tentang pembentukan cabang Pengadilan Agama / Mahkamah syariah Propinsi serta Pengadilan Agama / Mahkamah syariah. Keputusan mana Pengadilan Agama Larantuka diberi tugas menyelenggarakan dan menyelesaikan perkara-perkara dari wilayah hukumnya, diikuti Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 tahun 1982 tentang pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam keputusan tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dibentuk untuk memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada masyarakat pencari keadilan, dan sesuai klasifikasi penentuan kelas Pengadilan dalam keputusan Menteri Agama Ri No. 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Propinsi dan Pengadilan Agama serta Pengadilan Agama / Mahkamah syariah, wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka meliputi wilayah Kabupaten Flores Timur.

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Larantuka, dalam operasional awalnya masih menggunakan gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka hingga berdirinya bangunan Gedung Pengadilan Agama Larantuka

yang diserahkan terimakan pada tanggal 29 November 1985. Pada saat Pengadilan Agama Larantuka beroperasi hingga tahun 2001, wilayah hukumnya cukup luas, dikarenakan wilayah Kabupaten Flores Timur meliputi pulau Lembata. Dalam perkembangannya, untuk pulau Lembata dibentuk Kabupaten tersendiri sebagai bentuk pemekaran Kabupaten, sekaligus berdirilah Pengadilan Agama Lewoleba yang mewilayahi Kabupten Lembata. Maka sejak berdirinya Pengadilan agama Lewoleba, wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka menjadi berkurang.²

3. Wilayah Yuridiksi

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 3 Lampiran II Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka meliputi wilayah Kabupaten Flores Timur dengan Ibu kotanya Larantuka.

Sesuai data dalam buku yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kabupaten Flores Timur, maka wilayah ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Letak dan batas-batasnya :

a. Letak Geografis

Utara	Timur	Selatan	Barat
8 ⁰ 04' LS	125 ⁰ 57' BT	8 ⁰ 40'	123 ⁰ 38'

²Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Larantuka

b. Batas-batas

Utara	Timur	Selatan	Barat
Laut Flores	Selat Warica	Kab. Lembata	Kab. Sikka

2. Iklim dan Keadaan Tanah

Kabupaten Flores Timur beriklim tropis, sebagian besar tanahnya ditumbuhi padang rumput/alang-alang dan sebagian kecil ditumbuhi oleh hutan belantara, luas tanah sebelum terjadi gempa bumi tanggal 12 Desember 1992 adalah 307.923 ha. terdiri dari :

Tanah pemukiman	6.908,85 ha.
Tanah kering	72.500,85 ha.
Tanah kehutanan	26.897,00 ha.
Tanah perkebunan	20.364,16 ha.
Tanah persawahan	886.00 ha.
lain-lain	181.886,61 ha.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pengendalian organisasi Pengadilan Agama agar berjalan dengan terarah, efektif dan efisien perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memadai, baik Sumber Daya Manusia dibidang Teknis Yudisial maupun Sumber Daya Manusia non Teknis Yudisial.

1. Sumber Daya Manusia teknis Yustisial

Adapun Sumber Daya Manusia teknis Yudisial di Pengadilan Agama

Larantuka adalah sebagai berikut :

1. 1 Orang Wakil Ketua
2. 3 Orang Hakim
3. 1 Orang Panitera/Sekretaris
4. 1 Orang wakil Panitera.
5. 1 Orang Panitera Muda Hukum
6. 1 Penitera Pengganti
7. 1 Orang jurusita pengganti
8. Sedangkan Panitera Muda Gugatan dan Permohonan sampai saat ini masih kosong. Sementara jurusita Pengganti yang lain masih dirangkap oleh Wakil Sekretaris dan kaur-kaur.

2. Sumber Daya Manusia non Teknis yudisial

Adapun Sumber Daya Manusia non Teknis Yudisial di Pengadilan Agama

Larantuka adalah sebagai berikut :

- a. 1 Orang wakil sekretaris merangkap jurusita Pengganti
- b. 1 Orang Kaur Keuangan merangkap Juru sita Pengganti
- c. 1 Orang Kaur Kepegawaian
- d. 1 Orang Kaur Umum
- e. 1 Orang bendahara Pengeluaran

- f. 2 Orang satpam, 2 Orang pramubakti dan 1 Orang sopir³

3. Promosi dan Mutasi

Untuk pengisian jabatan yang kosong di Pengadilan Agama Larantuka, Baperjakat Pengadilan Agama Larantuka menginventarisir para pegawai baik Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial untuk diusulkan menduduki jabatan yang kosong disesuaikan dengan Bezetting Formasi yang telah dibuat oleh Kaur Kepegawaian.

Adapun jabatan yang belum terisi di Pengadilan Agama Larantuka adalah :

- a. Panitera Muda Gugatan
- b. Panitera Muda Permohonan
- c. Panitera Pengganti⁴

.Sedangkan Jabatan belum terisi lainnya sampai sekarang belum pernah diusulkan untuk menduduki jabatan tersebut karena di Pengadilan Agama Larantuka sampai saat ini belum ada yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan yang kosong itu, sehingga belum ada yang diusulkan.

Sedangkan untuk mutasi selama tahun 2012, meliputi :

- a. Kenaikan Gaji Berkala :

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1) Drs. Muhamad Camuda, MH | 01-03-2012 |
| 2) Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, MH. | 01-03-2012 |
| 3) Samsudin, S.Ag. | 01-03-2012 |
| 4) Faisal, S.Ag., MH. | 01-05-2012 |

³Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Larantuka

⁴Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Larantuka

- | | |
|----------------------------|------------|
| 5) Abdullah Muhammad. | 01-12-2012 |
| 6) Ulfatus Saidah, SH., MH | 01-12-2012 |

b. Kenaikan pangkat reguler :

1. Abdullah Muhammad dari Pengatur Muda Tk.I II/b ke Pengatur II/c
TMT. 01-04-2012
2. Faisal, S.Ag., MH. dari Penata Muda, III/a ke Penata Muda Tk.I, III/b
TMT 01-10-2012

c. Usul Kenaikan Pangkat periode 01 April 2013

1. Sakinah Al-hamidy, SH. dari III/a ke III/b Periode 01 April 2013
2. Khalil Wazir Bin Idris, S.Kom. dari III/a ke III/b Periode 01 April 2013

d. Pindah Tugas :

1. Drs. Muhamad Camuda, MH. Mutasi Pindah dari Pengadilan Agama Larantuka Kls. II ke Pengadilan Agama Kupang Kls. IB SK Mutasi 1326 /
DjA / KP.04.06 / SK / VI / 2012, tanggal, 07 Juni 2012.
2. Lalu Mansub Mutasi pindah dari Pengadilan Agama Larantuka Kls. II ke
Pengadilan Agama Kupang Kls. IB, SK mutasi Nomor W23-A/ 998 /
Kp.04.6 / IX / SK / 2012, tanggal 10 September 2012.
3. Sakinah Al-hamidy, SH. Mutasi pindah dari Pengadilan Agama Maumere
Kls. II ke Pengadilan Agama Larantuka Kls. II, SK mutasi Nomor W23-A /
1084 / Kp.04.6 / X / SK / 2012, tanggal 01 Oktober 2012.
4. Perkembangan dan Wilayah Penduduknya

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 18 Kecamatan dan 226 Desa serta 17 Kelurahan dengan jumlah penduduk menurut data badan pusat statistik tanggal 16 November 2010 tentang data jumlah penduduk masing-masing Desa dan Kelurahan Tahun 2010 sebesar 232.935 jiwa, yang beragama Islam 47.572 jiwa (20,42 %) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Larantuka, luas wilayah 75,91 km² terdiri dari 2 desa dan 13 kelurahan dengan jumlah penduduk 33.882 jiwa yang beragama Islam 5.592 jiwa (16,48 %).
- 2) Kecamatan Ile Mandiri, luas wilayah 74,24 km² terdiri dari 8 desa / kelurahan dengan jumlah penduduk 9.256 jiwa yang beragama Islam 213 jiwa (4,32 %).
- 3) Kecamatan Wulang Gitang, luas wilayah 225,96 km², terdiri dari 10 desa dengan jumlah penduduk 13.057 jiwa, yang beragama islam 108 jiwa (0,83 %).
- 4) Kecamatan Titehena, luas wilayah 211,70 km² terdiri dari 12 desa / kelurahan, dengan jumlah penduduk 11.864 jiwa, yang beragama Islam 380 jiwa (3,20 %).
- 5) Kecamatan Ile Bura, luas wilayah 48,53 km² terdiri dari 5 desa / kelurahan, dengan jumlah penduduk 6.230 jiwa, yang beragama Islam 11 jiwa (0,18 %).
- 6) Kecamatan Tanjung Bunga, luas wilayah 234,55 km², terdiri dari 14 desa dengan jumlah penduduk 11.584 jiwa, yang beragama Islam 610 jiwa (5,27 %).

- 7) Kecamatan Lewolema luas wilayah 108,61 km², terdiri dari 7 desa dengan jumlah penduduk 8.275 jiwa, yang beragama Islam 39 jiwa (0,47 %).
- 8) Kecamatan Demon Pagong luas wilayah 57,37 km², terdiri dari 7 desa dengan jumlah penduduk 4.367 jiwa, yang beragama Islam 21 jiwa (0,48 %).
- 9) Kecamatan Solor Timur, luas wilayah 75,66 km², terdiri dari 19 desa dengan jumlah penduduk 14.514 jiwa, yang beragama Islam sebanyak 9.276 jiwa (63,56 %).
- 10) Kecamatan Solor Barat, luas wilayah 150,68 km², terdiri dari 18 desa dengan jumlah penduduk 12.962 jiwa, yang beragama Islam sebanyak 38 jiwa (0,29 %).
- 11) Kecamatan Adonara Barat, luas wilayah 55,97 km² terdiri dari 16 desa dengan jumlah penduduk 11.545 jiwa, yang beragama Islam 1.367 jiwa (11,84 %)
- 12) Kecamatan Wotan Ulumado, luas wilayah 75,81 km², terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk 8.056 jiwa, yang beragama Islam 939 jiwa (11,66 %)
- 13) Kecamatan Adonara Tengah, luas wilayah 57,99 km², terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk 11.477 jiwa, yang beragama Islam 2.523 jiwa (21,98 %)

- 14) Kecamatan Adonara Timur, luas wilayah 108,94 km², terdiri dari 18 desa dengan 1 Kelurahan dengan jumlah penduduk 26.699 jiwa, yang beragama Islam 13.988 jiwa (52,39 %).
- 15) Kecamatan Kelubagolit, luas wilayah 45,12 km² terdiri dari 11 desa dengan jumlah penduduk 10.276 jiwa, yang beragama Islam 2.504 (24,37 %)
- 16) Kecamatan Ile Boleng, luas wilayah 51,39 terdiri dari 20 desa dengan jumlah penduduk 14.480 jiwa, yang beragama Islam 1.299 jiwa (8,97%)
- 17) Kecamatan Witihama, luas wilayah 77,97 km², terdiri dari 13 desa dengan jumlah penduduk 14.538 jiwa, yang beragama Islam 3.455 jiwa (23,77 %).
- 18) Kecamatan Adonara, luas wilayah 46,45 km², terdiri dari 8 desa dengan jumlah penduduk 9.873 jiwa, yang beragama Islam 5.209 jiwa (52,38 %).

B. Alasan Pengajuan Permohonan Wali Adal di Pengadilan Agama Larantuka

Alasan calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali *adal* karena wali dari calon mempelai wanita enggan untuk menikahkan. Ada beberapa faktor sehingga menyebabkan wali dari pihak calon mempelai wanita enggan menikahkan :

1. Terjadinya kesenjangan sosial antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita disebabkan karena adanya strata sosial, yang

dimana perbedaan status antara pihak keluarga calon mempelai wanita dengan pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

2. Biasanya juga wali dari calon mempelai wanita mempertimbangkan enggan untuk menikahkan karena faktor ekonomi dari calon mempelai laki-laki.
3. Akhlak dari calon mempelai laki-laki kurang baik, bisa saja calon mempelai laki-laki suka meminum minuman keras dan suka bermain judi.
4. Adanya juga karakter budaya yang berbeda, menyebabkan wali dari calon mempelai wanita enggan untuk menikahkan karena adanya perbedaan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi.
5. Calon mempelai laki-laki muallaf dan rata-rata keluarganya bukan beragama Islam, menyebabkan wali dari calon mempelai wanita enggan untuk menikahkan, dengan alasan kurangnya ilmu agama dari calon mempelai laki-laki.⁵

C. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Larantuka Dalam Penetapan Wali Adal*

Pertimbangan hakim mengenai penetapan wali *adal*, diambil berdasarkan putusan hakim pada tahun 2008 dalam Putusan Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lrt.⁶

1. Pokok Perkara

⁵Hasil wawancara dengan M. Jimmy Kurniawan. Hakim Pengadilan Agama Larantuka pada tanggal 12 April 2017.

⁶Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Larantuka

Pemohon, berumur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Flores Timur, Bertempat tinggal di BOB SABLON, Jln. Herman Fernandes No. 127 RT. 01/RW. 03 Kelurahan Ekasapta Larantuka Flores Timur NTT. Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dalam register, Nomor Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lrt tanggal 21 November 2008, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juni 2008 pemohon telah mengenal seorang ikhwan (AHMAD ULLY AGAN) umur 31 tahun, agama Islam yang masih melanjutkan studi pasca sarjana di Ma'had Al-biir, Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan dengan maksud berumah tangga dan melangsungkan pernikahan.
2. Bahwa hubungan pemohon dengan calon suami pemohon adalah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan atau bujukan dan pengaruh dari siapapun akan tetapi atas dasar kemauan dan pemilihan pemohon.
3. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah mengadakan kesepakatan dan persetujuan untuk menikah secara agama Islam.
4. Bahwa pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit pada tanggal 17 November 2008 sebagai tempat pelaksanaan akad nikah yang insya Allah disepakati untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2008.
5. Bahwa bapak kandung pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon adalah bukan karena tidak mengizinkan

pemohon tidak untuk menikah. Pemohon diizinkan untuk menikah tetapi bapak kandung pemohon tidak dapat/tidak bersedia menikahkan ataupun memberi wakil wali untuk menikahkan pemohon, pemohon sudah meminta secara langsung kepada bapak kandung pemohon tetapi bapak pemohon tetap tidak berkenan dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan menganjurkan agar ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan wali hakim.

6. Bahwa wali nasab selain bapak kandung pemohon tidak berada disini (saudara laki-laki bapak dll) dan pemohon sendiri tidak memiliki saudara laki-laki.
7. Bahwa pernikahan ini harus segera dilaksanakan dan tidak dapat menunggu wali nasab yang lainnya.
8. Bahwa calon suami pemohon bersedia menjadi suami dan bertanggung jawab membina rumah tangga apabila telah menjadi suami istri dan insya Allah bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan lahir dan bathin.

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan tersebut, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka untuk menghadirkan dan memeriksa pemohon di Pengadilan Agama Larantuka serta memutus :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan *adanya* wali nasab pemohon (WAJA ABDULRAHMAN) agar pemohon (HALIMA WEA BINTI WAJA ABDULRAHMAN) dapat

melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon (AHMAD ULLY AGAN) dengan wali hakim ;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa sesuai surat penetapan hari sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pemohon dan wali pemohon telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan.

Bahwa pemohon telah hadir menghadap di persidangan di kantor Pengadilan Agama Larantuka sedangkan wali pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan resmi masing-masing tanggal 25 November 2008 dan 2 Desember 2008 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon melalui jalur mediasi dan setiap persidangan Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar pemohon berdamai dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri dan merubah posita point 5 menjadi “ bahwa bapak kandung pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon karena orangtua pemohon sudah mencalonkan pemohon dengan pria lain yang pemohon tidak mengenal dan mengetahui calon pilihan orangtuanya tersebut”, kemudian pemohon menambahkan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah berusaha meminta bantuan melalui pihak ketiga yaitu paman pemohon dari pihak ibu pemohon untuk mendekati dan meminta kesediaan ayah pemohon menjadi wali nikah pemohon, namun hasilnya ayah pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali pemohon karena ayah pemohon takut akan terjadi percekcoakan antara ayah pemohon dengan ibu pemohon karena ibu pemohon yang tidak menginginkan pemohon menikah dengan pria pilihan pemohon.
2. Bahwa orangtua pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon karena ibu pemohon menyatakan calon suami pemohon postur tubuhnya kecil dan kurus, disamping itu juga ibu pemohon sudah mempunyai calon pilihannya yaitu seorang laki-laki keluarga dari pihak ibu pemohon yang sedang bekerja di Korea.
3. Bahwa pemohon menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda antara pemohon dan calon suami pemohon yang akan menghalangi sahnya pernikahan pemohon dan calon suami pemohon.
4. Bahwa memang benar pemohon tidak mempunyai wali nasab selain ayah pemohon.
5. Bahwa calon suami pemohon sedang kuliah S2 di Makassar dan sedang menjadi tenaga honorer sebagai guru MTS. Negeri Tarakan di Kalimantan Utara.
6. Bahwa calon suami pemohon adalah pria yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai pemohon.

Bahwa ayah kandung pemohon (WAJA ABDULRAHMAN bin DAHLAN SAKE) telah dipanggil secara sah dan patut untuk diminta keterangannya, akan tetapi ayah kandung (wali nasab) pemohon tersebut tidak hadir.

Bahwa calon pemohon telah hadir dipersidangan untuk didengar keterangannya dan mengaku bernama AHMAD ULLY AGAN bin ARIFAN KOLOT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Horo Hura Adonara Flores Timur dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ia kenal dengan pemohon sejak bulan Juni 2008 melalui pamannya dan sejak itu calon suami pemohon berhubungan dengan pemohon via telepon sampai calon suami pemohon bertemu muka pada akhir bulan September (akhir Ramadhan).
2. Bahwa calon suami pemohon membenarkan keterangan pemohon bahwa ia ingin menikah dengan pemohon atas dasar hati yang tulus dan saling mencintai.
3. Bahwa calon suami pemohon bersama keluarganya pernah bersilaturahmi ke rumah pemohon dan bertemu dengan orangtua pemohon sambil membicarakan kelanjutan hubungan pemohon dengan calon suami pemohon akan tetapi belum melakukan khitbah (lamaran), namun orangtua pemohon memberikan tanggapan yang baik.
4. Bahwa calon suami pemohon menyatakan ketika pertemuan kedua kalinya untuk membicarakan keinginan calon suami pemohon untuk menikahi pemohon, orangtua pemohon berubah pendirian dan menunjukan

ketidaksetujuannya atas hubungan mereka dengan menyatakan bahwa ayah pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon karena calon suami pemohon kurus dan fisiknya kecil, dan orangtua pemohon akan menjodohkan pemohon dengan pria lain, tidak berhenti sampai disitu, keluarga calon suami pemohon terus melakukan pendekatan sampai 4 kali namun orangtua pemohon tetap tidak menyetujui terutama ibu pemohon.

5. Bahwa calon suami pemohon bersedia menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab serta akan selalu mencintai pemohon dan walaupun orangtua pemohon tetap tidak menyetujui hubungannya dengan pemohon, calon suami pemohon akan tetap menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan orangtua dan keluarga pemohon.
6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangganya nanti, calon suami pemohon akan mencari pekerjaan sebagai guru disamping berwiraswasta.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai aslinya atas nama pemohon Nomor : 24.0803.480382.2001 tanggal 29 April 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Larantuka Kabupaten Flores Timur telah dilegalisir dan dinazegelen, diberi kode P.1.
2. Bukti 2 orang saksi yaitu :

2.1. AKBAR SAMIUN BIN SAMIUN SUBAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru Ekasapta Larantuka Flores Timur.

Di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- i. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga jauh dan saksi kenal calon suami pemohon tidak lama
- ii. Bahwa saksi tahu maksud pemohon bersidang di Pengadilan Agama untuk meminta wali hakim atas keinginannya menikah dengan seorang pria karena wali nasab pemohon enggan untuk menikahkannya
- iii. Bahwa setahu saksi, pemohon dan calon suami pemohon kenal setahun yang lalu
- iv. Bahwa saksi tahu pemohon telah berusaha melakukan pendekatan kepada orangtua pemohon agar mau menikahkannya baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga dan calon suami pemohon pernah melamar, namun orangtua pemohon tetap tidak setuju karena orangtua pemohon tidak ingin menikahkan pemohon dengan seorang pria yang dipanggil ustadz dan juga orangtua pemohon katanya telah mempunyai calon yang lain
- v. Bahwa saksi tahu antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan keluarga (nasab), sesusuan ataupun semenda yang akan menghalangi sahnya pernikahan pemohon dan calon suami pemohon
- vi. Bahwa setahu saksi, pemohon dan calon suaminya saling mencintai serta tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan saksi tahu pemohon pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Larantuka

- vii. Bahwa saksi tahu, calon suami pemohon mampu untuk menghidupi rumah tangga nanti, karena ia bisa berwiraswasta dan menjadi tenaga pendidik
- viii. Bahwa setahu saksi, walaupun antara pemohon dan orangtua pemohon telah terjadi perselisihan namun pemohon dan orangtuanya masih tetap bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan baik

2.2. ZAINAB BINTI ZEN JUNAIDI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Postoh Larantuka Flores Timur.

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan pemohon satu tahun yang lalu sebagai teman pengajian, tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak begitu kenal dengan calon suami pemohon, akan tetapi saksi pernah datang ke rumah calon suami pemohon
- b) Bahwa saksi kenal dengan orangtua pemohon dan pernah datang ke rumah pemohon dua kali
- c) Bahwa saksi tahu maksud kedatangan pemohon ke Pengadilan Agama untuk menetapkan wali hakim karena pemohon ingin menikah dengan seorang pria pilihannya, namun orangtua pemohon enggan untuk menikahkannya, karena calon suami pemohon fisiknya kecil dan orangtua pemohon telah mempunyai pria pilihan sendiri tanpa sepengetahuan pemohon
- d) Bahwa saksi tahu calon suami pemohon pernah melamar atau tidak

- e) Bahwa setahu saksi antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang akan menghalangi sahnya pernikahan
- f) Bahwa saksi tahu antara pemohon dan calon suami pemohon telah berpacaran 4 bulan yang lalu dan calon suami pemohon sekarang masih kuliah S2 di Makassar
- g) Bahwa saksi berkeyakinan calon suami pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab serta sanggup untuk menjamin kehidupan pemohon nantinya, karena saksi tahu keadaan dan kondisi keluarga pemohon
- h) Bahwa saksi tahu pemohon telah pernah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kelubagolit karena saksi yang mengantarkan kesana bersama keluarga calon suami pemohon karena calon suami pemohon masih di Makassar dan calon suami pemohon tetap berhubungan dengan pemohon melalui telepon
- i) Bahwa saksi tahu sejak keinginan pemohon menikah dengan calon suami pemohon tersebut menyebabkan hubungan pemohon dengan orangtuanya kurang harmonis, namun antara pemohon dan orangtua pemohon masih terjalin komunikasi dan silaturahmi

Bahwa setelah kesaksian saksi tersebut dikonfirmasi kepada pemohon, pemohon menyatakan kesaksian saksi tersebut benar semua kecuali yang dibantah sebagai berikut :

Bahwa pemohon membantah keterangan saksi pertama mengenai perkenalan antara pemohon dan calon suami pemohon sejak bulan Juni 2008 (4 bulan yang lalu) bukan setahun yang lalu, dan membantah calon suami pemohon belum melamar akan tetapi hanya melakukan pendekatan dan pembicaraan awal dan pemohon pernah mendaftar di KUA Kelubagolit bukan KUA Kecamatan Larantuka

2. Tentang Hukumnya

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar walinya/ayah kandung pemohon yang bernama Waja Abdulrahman bin Dahlan Sake, dinyatakan *adhal* dengan mendalilkan bahwa walinya tersebut telah enggan atau menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Ahmad Ully Agan bin Arifan Kolot dengan alasan yang tidak berdasar hukum, karena penolakan itu hanya didasarkan atas penilaian wali tersebut yang tidak mau mengawinkan pemohon karena fisik dari calon suami pemohon kurus dan postur tubuhnya kecil, dan orangtua pemohon sudah mempunyai orang lain sebagai calon suami pemohon atas pilihan ibu pemohon yaitu seorang laki-laki dari keluarga ibu pemohon yang bekerja di Korea. Walaupun pemohon telah berusaha dengan sekuat tenaga baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga yaitu paman pemohon dari pihak ibu untuk mendekati dan meminta secara baik-baik kepada ayah pemohon.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim, maka sangat beralasan apabila wali pemohon tersebut dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan terhadap permohonan penetapan *adalnya* wali tersebut untuk didengar keterangannya. Oleh karena itu, wali pemohon Waja Abdulrahman bin Dahlan Sake yang tidak mau hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa sikap ayah pemohon yang sedemikian sebagaimana tersebut diatas dapat dinyatakan sebagai “*Adal*” (enggan), dan pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini telah sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Larantuka Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1987 tentang wali hakim jo pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan pemohon serta saksi yang diajukan pemohon, maka sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit sebagai wali hakim bagi pemohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pengajuan permohonan wali *adhal* terjadi karena wali nasab enggan untuk menikahkan, ada beberapa faktor sehingga wali nasab enggan untuk menikahkan; 1) Adanya kesenjangan sosial antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita, 2) Masalah ekonomi dari calon mempelai laki-laki, 3) Akhlak, 4) Karakter budaya yang berbeda, 5) Fisik
2. Pertimbangan Hakim dalam penetapan wali *adhal* karena wali nasab memberikan alasan untuk tidak menikahkan calon mempelai wanita dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum sehingga Hakim mengabulkan permohonan wali *adhal* dari calon mempelai wanita.

B. Implikasi Penelitian

1. Hubungan antar keluarga hendaknya dijaga kerahamonisannya, terutama hubungan antara orangtua dan anak. Dan alangkah baiknya bila tidak ada yang memaksakan egonya masing-masing.
2. Bagi para orangtua, untuk jangan khawatir menikahkan anaknya. Para orangtua hendaknya jangan menjadi penghalang bagi anaknya untuk menikah kalau memang anaknya sudah sangat ingin menikah dan takut terjatuh kedalam perbuatan dosa. Terlebih lagi karena alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum dan yang tidak dibenarkan oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI. 2004.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- I Doi, Abdul Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- KBBI offline. Versi 1.2. Ehta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III. 2010.
- Muhtar, Kamal. *Azaz-azaz Dalam Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi I. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*. Tim Permata Press: Jakarta, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *fiqh islam*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Samin, Sabri. *Fikih II*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Sosroatmojo, Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2011.

Tholib, M. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Bandung : Irsyad Baitu Salam, 1995.



Lampiran - Lampiran



1. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Larantuka



2. Ruangan Hakim Pengadilan Agama Larantuka



3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Larantuka



4. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Larantuka

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Fauzan Ismail Ratuloly, NIM 10100113011, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adhol di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur ", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan Seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 20 Desember 2016

Pembimbing I

Dr. H.M.Saleh Ridwan, M.Ag.
NIP. 196406011993031003

Pembimbing II

Dr.M.Thahir Maloko, M.Hi.
NIP. 196312311995031006

Mengetahui :

Ketua Jurusan Peradilan Agama



Dr. H Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003



PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Jln. Ahmad Yani No. 10 ☎ (0383) 21256

Website : www.pa-larantuka.net, E-mail : palarantuka@rocketmail.com

LARANTUKA – NTT 86218

Larantuka, 27 April 2017

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI **TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : W23-A12/ *245* / PB.01/IV/2017

Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar, Nomor : 1396/51.1/PP.00-9/III/2017, Perihal : Permohonan Izin Penelitian;-

Mencerangkan :

Nama : FAUZAN ISMAIL RATULOLY

NIM : 10100113011

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Peradilan Agama

Semester : VIII (delapan)

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Larantuka

Judul : " PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI ADAL DI
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA (PUTUSAN HAKIM
TAHUN 2008)"

Lama Penelitian : 1 (satu) bulan, dari Tanggal 1 April s/d 1-Mei 2017

Demikian Surat Keterangan / Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KETUA,

H. TAMIM, SH.

NIP.19640729 198802 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal di Pengadilan Agama Larantuka (Putusan Hakim Tahun 2008)", yang disusun oleh Fauzan Ismail Ratuloly, NIM: 10100113011, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah melaksanakan penelitian, diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 13 Juli 2017 M
19 Syawal 1438 H

Pembimbing I


Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.
NIP. 19640601 199303 1 003

Pembimbing II


Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I.
NIP.19631231 199503 1 006

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan


Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 19650302 199403 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Skripsi yang berjudul, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur (Putusan Hakim Tahun 2008)", yang disusun oleh Fauzan Ismail Ratuloly, NIM: 10100113011, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, diteliti, dan disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 24 Juli 2017 M

30 Syawal 1438 H

Penguji I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Penguji II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I.

Disetujui oleh

Ketua Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI ADAL DI PENGADILAN AGAMA LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR (PUTUSAN HAKIM TAHUN 2008)”** bernama lengkap Fauzan Ismail Ratuloly, Nim : 10100113011, Anak pertama dari tiga bersaudara

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Inpres Larantuka pada tahun 2002-2007 Sampai Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Adonara Timur di tahun 2007-2010, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Larantuka tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa di jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus HMJ Peradilan Agama Periode 2014-2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R